

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan populasi dan urbanisasi yang pesat, kota-kota di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengelola sampah dengan efisien dan berkelanjutan¹. Di Indonesia, masih sangat banyak persoalan mengenai lingkungan yang membutuhkan penyelesaian dan penanganan secara serius. Salah satu diantaranya seperti permasalahan sampah, yang mana merupakan suatu hal yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak dan juga masyarakat²

Setiap tahun timbunan sampah semakin bertambah terkhususnya di kota Yogyakarta, maka diperlukan pengelolaan sampah yang benar untuk menangani hal tersebut. Pengelolaan sampah perkotaan dilakukan dengan dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Pengelolaan sampah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ditangani sebagian besar oleh pemerintah secara sentralisasi. Pengelolaan tersebut mulai dari penarikan retribusi, pengumpulan dari sumber, pengumpulan di TPS, dan pengangkutan ke TPA.³

Dalam hal peran dan tanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membiayai melalui APBN dan APBD baik berupa biaya penanganan timbunan sampah maupun bentuk kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan

¹ Hakim, M. Z. 2019. Pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan. *Amanna Gappa*, 111-121.

² Raharja, M. A. B. 2024. Tinjauan Yuridis Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran di Kabupaten Bantul (Studi Kasus Bank Sampah Gemah Ripah) (*Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*)

³ Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. 2014. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik. *Kesmas*, 8(8), 404-410.

sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Hal ini selaras dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) terdapat Urusan Pemerintah Wajib yang tidak memiliki kaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Salah satunya adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).⁴

Perspektif yuridis dalam pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian⁵. Dalam konteks ini, perlu ditinjau bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Permasalahan yang dihadapi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 4 huruf (d) tentang pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah cukup kompleks dan beragam. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan anggaran daerah yang menghambat pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), serta armada pengangkut sampah. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan sampah modern juga menjadi kendala tersendiri.

⁴ Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2)

⁵ Ma'arif, K. 2023. Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Sampah Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *awig awig*, 3(1).

Pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta seharusnya dilaksanakan melalui metode yang tepat guna mengatasi permasalahan lingkungan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan berbagai strategi penanganan sampah, yang salah satunya tercantum dalam Pasal 4 huruf (d) Perda DIY. Pasal tersebut mengatur bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Ketentuan ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang memadai guna mendukung sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pelaksanaan tugas ini sangat penting, karena ketersediaan dan kelayakan fasilitas pengelolaan sampah berpengaruh langsung terhadap efektivitas proses pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah. Berdasarkan urgensi tersebut, dilakukanlah penelitian dengan judul: " Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tentang Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pasal 4 Huruf (D) Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah daerah kota Yogyakarta tentang penyediaan fasilitas pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 4 huruf (d) Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dan sejenis sampah rumah tangga?

2. Apa saja kendala dan solusi pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah daerah kota Yogyakarta tentang penyediaan fasilitas pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 4 huruf (d) Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dan sejenis sampah rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah daerah kota Yogyakarta tentang penyediaan fasilitas pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 4 huruf (d) Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dan sejenis sampah rumah tangga.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah daerah kota Yogyakarta tentang penyediaan fasilitas pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 4 huruf (d) Perda DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah dan sejenis sampah rumah tangga

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan tata kelola pemerintahan daerah terkait pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kajian-kajian akademik lainnya yang membahas implementasi kebijakan publik berbasis peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan masukan serta gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, termasuk kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam sistem pengelolaan sampah serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung kebijakan pemerintah daerah.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang ingin mengkaji pengelolaan sampah dari perspektif hukum maupun lingkungan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan tentang peran hukum dalam mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan daerah serta memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam menegakkan peraturan terkait pengelolaan sampah secara tegas dan adil.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Tentang Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Berdasarkan Pasal 4 Huruf (D) Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Yogyakarta” bukan merupakan salinan atau plagiasi dari penelitian lain, melainkan merupakan karya asli penulis. Beberapa penelitian lain memiliki tema yang serupa dengan judul penelitian ini, namun masing-masing mengangkat permasalahan yang berbeda, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Identitas Penulis Maria Ermilinda
Tahun 2022
Judul Penulisan Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang
Hukum Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pengelolaan
Sampah Kota Semarang)
Hasil Penelitian Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota
Semarang telah berjalan meskipun masih
menghadapi beberapa hambatan, terutama dalam
proses pengumpulan dan pengolahan akhir. Tahap
pengumpulan dilakukan oleh masyarakat, sedangkan
pengolahan akhir dilakukan oleh UPTD dan PT.
Jatibarang, seperti pemupukan dan penanganan
limbah sebelum dibuang ke alam. Efektivitas
program pengelolaan sampah sangat bergantung
pada ketersediaan sarana dan prasarana seperti

gerobak sampah, kendaraan angkut, dan alat berat. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kreativitas dan keterampilan dalam mendaur ulang sampah. Kurangnya pemahaman, minat masyarakat, serta tidak jelasnya target pasar dan pemasaran produk daur ulang juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan program daur ulang sampah di Kota Semarang.

Perbedaan Penelitian	Hasil	Perbedaan penelitian yang telah dilakukan dan akan dilakukan terletak pada perbedaan sampel, dimana pada penelitian yang telah dilakukan berfokus kepada pengelola sampahnya, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan akan difokuskan kepada yang memberi kewenangan.
----------------------	-------	---

2. Identitas Penulis	Prita Natalia Debora Solang
Tahun	2025
Judul Penulisan Hukum	Kajian Yuridis Implementasi Pengelolaan Sampah Menurut Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah
Hasil Penelitian	Penerapan kebijakan dalam Perda seringkali tidak

selaras dengan pelaksanaan di lapangan akibat ketiadaan peraturan pelaksana yang mengatur langkah teknis dan jadwal implementasi secara rinci. Hal ini menyulitkan implementasi kebijakan secara efektif, menyebabkan kebingungan di antara pihak terkait, dan menghambat pencapaian tujuan pengelolaan. Selain itu, keberhasilan pengelolaan sampah juga tergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas dan membuat kebijakan, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan, seperti masih membuang sampah sembarangan, menjadi hambatan besar. Minimnya partisipasi dalam pemilahan dan daur ulang, serta kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam program edukasi, turut menghambat efektivitas kebijakan pengelolaan sampah.

Perbedaan Penelitian	Hasil	Pada penelitian yang telah dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum empiris
----------------------	-------	--

3. Identitas Penulis	Putri Rahayu
Tahun	2024
Judul Penulisan Hukum	Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Di Kecamatan Mattiro Bulu
Hasil Penelitian	Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Mattiro Bulu belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum terbentuknya lembaga pengelola sampah di tingkat RT, RW, desa, dan kecamatan secara menyeluruh, serta keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah yang berdampak pada belum tersedianya fasilitas pengelolaan sampah seperti tempat sampah rumah tangga, TPS, TPST, dan alat angkut sampah. Selain itu, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah belum merata, sehingga masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Faktor utama penghambat pelaksanaan perda ini adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya lokasi strategis untuk menempatkan kontainer sampah, yang menyebabkan pelayanan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah belum maksimal. Meskipun

secara prinsip Perda tersebut telah sesuai dengan perspektif *siyāsah dusturiyāh* karena bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, pelaksanaannya belum efektif dan masih menimbulkan dampak negatif akibat belum optimalnya penyediaan fasilitas serta pembinaan kepada masyarakat.

Perbedaan Hasil Penelitian	Pada penelitian yang telah dilakukan membahas tentang perspektif <i>siyāsah dusturiyāh</i> , sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan hanya akan membahas keterlaksanaan tugas dan wewenang serta kendala dan solusi dalam melaksanakan kebijakan.
----------------------------	---

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya⁶.

2. Penyediaan

Menurut Siagian Penyediaan adalah suatu proses pengadaan barang, jasa, atau layanan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien⁷.

3. Sampah

⁶ Hidayah, A., Agustina, D. S., Indirawati, D., & Amalia, S. 2021. Sistem Informasi Pelatihan Lisensi Penerbangan Pada Citilink Berbasis Web. *JTIM: Jurnal Teknik Informatika Mahakarya*, 4(2), 61-68.

⁷ Sondang P. Siagian. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat⁸.

4. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah⁹.

5. Sarana dan Fasilitas pengelolaan sampah

Dalam pengelolaan sampah, sarana merujuk pada alat dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah, sedangkan prasarana mencakup fasilitas dasar yang mendukung operasional pengelolaan sampah¹⁰.

6. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 Adalah Perda Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian menggunakan teknik pengamatan dan wawancara yang dilakukan berfokus pada fakta sosial.¹¹

2. Macam Data

⁸ Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁹ Septiani, U., Najmi, N., & Oktavia, R. 2021, Eco Enzyme: Pengolahan sampah rumah tangga menjadi produk serbaguna di Yayasan Khazanah Kebajikan. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ (Vol. 1, No. 1)*.

¹⁰ Rafidah, R., Masdayanti, M., & Haidah, N. 2024. Sistem Pengelolaan Sampah Di TPA Malimpung Kabupaten Pinrang. *Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat*, 24(1), 78-86.

¹¹ Solikin, N., 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media

a. Data Primer

Diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dan observasi. Data utama diambil dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

2) Bahan Hukum Sekunder

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

d) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memahami dasar hukum dan kebijakan terkait pengelolaan sampah yang diatur dalam Pasal 4 huruf (d) Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Melalui

analisis dokumen seperti peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta jurnal ilmiah.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer secara langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai narasumber utama yang memiliki kewenangan dan informasi mendalam mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah dalam penyediaan fasilitas pengelolaan sampah sesuai Pasal 4 huruf (d) Perda Nomor. 3 Tahun 2013. Serta Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Yogyakarta selaku penegak hukum, yaitu:

- 1) Ibu Wulandari selaku Staf Seksi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- 2) Ibu Yuli Budi Iswati dan Bapak Rengga Ardy Putra, selaku PPNS SATPOL PP Kota Yogyakarta.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, dan kantor SATPOL PP Kota Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah terkait penyediaan fasilitas pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

6. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai responden utama yang memiliki wewenang strategis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan sampah.

7. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta serta Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Yogyakarta, yaitu:

- a. Ibu Wulandari selaku Staf Seksi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta
- b. Ibu Yuli Budi Iswati dan Bapak Rengga Ardy Putra, selaku PPNS SATPOL PP Kota Yogyakarta.

8. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, dengan mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi, serta menafsirkan data menggunakan pendekatan hukum. Analisis dilakukan untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan peraturan daerah. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan penalaran induktif maupun deduktif.